

**TUGAS POKOK PEMERINTAH DAERAH
DALAM
PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**



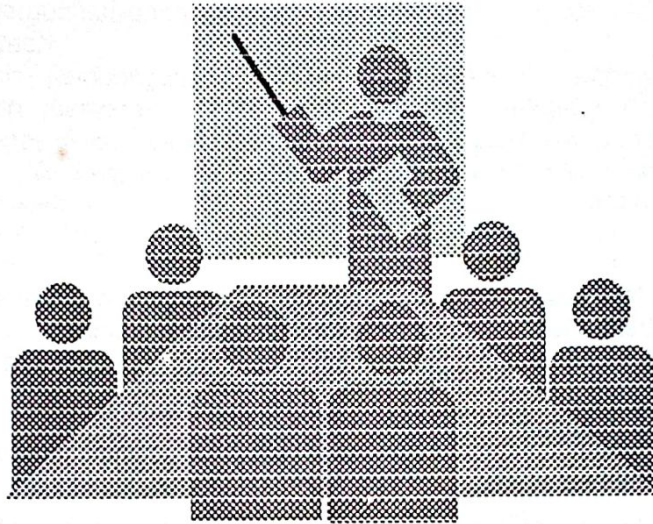
*Disampaikan pada Studi Interaktif Anggota DPRD
Kabupaten Batang*

Oleh :

H. IRCHAM ABDURROCHIM, BA

Tanggal 5 Pebruari 2000

**TUGAS POKOK PEMERINTAH DAERAH
DALAM
PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**



*Disampaikan pada Studi Interaktif Anggota DPRD
Kabupaten Batang*

Oleh :

H. IRCHAM ABDURROCHIM, BA

Tanggal 5 Pebruari 2000

POKOK BAHASAN I

DEFINISI DAN KONSEP KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang mencakup perubahan orientasi dan organisasi sistem sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran yang berkaitan dengan aspek ekonomi, dapat diukur antara lain dengan tingkat produksi, pengeluaran dan pendapatan. Sedangkan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh aspek non ekonomi, misalnya kesehatan, pendidikan dan keamanan. (Gunawan Sumodiningrat, 1999).

Beberapa definisi yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, dan aspek-aspek yang terkandung didalamnya, dapat ditemukan dalam berbagai dokumen perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 :

Salah satu tujuan Nasional Bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Undang-Undang Dasar 1945 :

Pasal 31 dan 32 : Pendidikan

Pasal 33 dan 34 : Kesejahteraan Sosial

3. Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004

Salah satu misi pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu ; pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

4. Undang – Undang No. 22 tahun 1999 :

Pasal 22, salah satu kewajiban DPRD adalah : meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi.

Pasal 43, salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah : meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Penjelasan pasal ini :

pembinaan dan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah yang mencakup permodalan, pemasaran, pengembangan teknologi, produksi dan pengolahan serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM)

5. **Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Bidang Agama dan Sosial Budaya**, mencakup aspek – aspek Agama, Penanggulangan kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Kependudukan, Seni dan budaya, Perempuan, Perumahan dan pemukiman, serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. **Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Tatib DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun 1999, bertugas dalam bidang Kesra**, yang meliputi aspek-aspek : Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah raga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Transmigrasi serta Permuseuman dan Cagar Budaya.

Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, antara lain :

1. ***Physical Quality Life Index (PQLI)*** atau lazim disebut Indeks Mutu Hidup (IMH)
IMH mengandung 3 parameter, yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu berusia satu tahun dan tingkat melek huruf bagi penduduk usia 15 tahun atau lebih.
2. ***Human Development Index (HDI)*** atau lazim disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM, mencakup 3 parameter pula, yaitu angka harapan hidup waktu lahir, tingkat melek huruf dan lamanya rerata sekolah pada orang dewasa serta tingkat pendapatan per kapita.

Kedua indikator diatas, mencoba mengukur kualitas penduduk baik secara fisik maupun non fisik. Ukuran fisik, tampak berkaitan dengan pengukuran angka kematian bayi, kemampuan memperpanjang usia serta tingkat pendapatan penduduk. Sedang ukuran non fisik berkaitan dengan pengukuran kualitas penduduk dari aspek kemampuan berpikir.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana membedakan tingkat kesejahteraan keluarga, menjadi 5 tingkatan, yaitu :

1. **Keluarga Pra sejahtera**, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, sandang, papan, pangan, kesehatan dan KB
2. **Keluarga Sejahtera Tahap I**, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi
3. **Keluarga Sejahtera Tahap II**, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik dan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan informasi
4. **Keluarga Sejahtera Tahap III**, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan fisik, sosial psikologisnya dan bentuk sumbangan material dan keuangan serta secara aktif menjadi pengurus lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungannya
5. **Keluarga Sejahtera Tahap III Plus**, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya serta memiliki kepedulian yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di sekitarnya.

Proses pembangunan diharapkan dapat menjamin meningkatnya kesejahteraan rakyat dalam segala bidang kehidupan. Kurang optimalnya proses pembangunan, kadang menimbulkan dampak ikutan, seperti diindikasikan dengan meningkatnya kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan dalam pembagian pendapatan antar golongan, daerah dan antar sektor.

Kemiskinan, seperti juga kesejahteraan merupakan konsep yang abstrak dan sangat relatif. Namun pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan, yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup dengan layak. Dengan demikian jika pendapatan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimumnya, maka orang tersebut dapat dikategorikan miskin.

Dalam kaitan ini, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut, bila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang telah ditetapkan (lebih rendah dari garis kemiskinan absolut). Sedang kemiskinan relatif terjadi bila tingkat pendapatan seseorang walaupun

telah di atas "garis kemiskinan" namun relatif lebih rendah dari pendapatan masyarakat sekitarnya.

"Garis kemiskinan" ialah pendapatan minimum yang merupakan batas pemenuhan kebutuhan hidup minimum.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999), ada beberapa pola kemiskinan :

1. **Persistent poverty**, kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun di suatu daerah, yang umumnya terjadi di daerah kritis sumberdaya alamnya atau di daerah terisolir
2. **Cyclical poverty**, kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan
3. **Seasonal poverty**, kemiskinan musiman, seperti sering dijumpai pada wilayah nelayan dan petani tanaman pangan
4. **Accidental poverty**, kemiskinan yang terjadi karena bencana alam atau dampak dari kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat

Sering dijumpai adanya perbedaan data-data yang berkaitan dengan kemiskinan yang dikumpulkan oleh berbagai sumber. Apabila ditelusuri lebih lanjut, perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan kriteria dalam pengukurannya.

Oleh karena itu perlu dipahami beberapa pendekatan yang digunakan dalam perhitungan jumlah kemiskinan penduduk, sebagai berikut :

1. **Kriteria Biro Pusat Statistik (BPS)**,
Kriteria yang digunakan BPS untuk mengukur garis kemiskinan, ialah pengeluaran minimum yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan minimum untuk hidup ini diukur dengan pengeluaran untuk makanan setara 2.100 kalori per kapita per hari, di tambah pengeluaran untuk kebutuhan non makan, yang meliputi perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian dan barang tahan lama. Dengan kriteria ini, ukuran "garis kemiskinan BPS", dapat berubah setiap tahun sesuai dengan perkembangan laju inflasi.
2. **Kriteria Bank Dunia**,
Kriteria yang digunakan Bank Dunia, seperti pada laporan yang dipublikasikan pada tahun 1990, untuk menentukan batas kemiskinan adalah pendapatan sebesar US \$ 285 per kapita per tahun.
3. **Kriteria Sayogyo**
Sayogyo, menggunakan pendekatan satuan kilogram beras ekuivalen untuk menentukan kriteria garis kemiskinan.
Berdasarkan kriteria ini, Sayogyo membagi kemiskinan menjadi 4 kategori, yaitu :

- a. Sangat miskin, bila mempunyai penghasilan yang setara dengan 240 Kg beras (di pedesaan) dan 360 Kg beras (di perkotaan) ekuivalen per orang per tahun.
 - b. Miskin, bila mempunyai penghasilan yang setara dengan 240 – 320 Kg beras (di pedesaan) dan 360 – 480 Kg beras (di perkotaan) per orang per tahun.
 - c. Hampir cukup, bila mempunyai penghasilan yang setara dengan 320 – 480 Kg beras (di pedesaan) dan 480 – 720 Kg beras (di perkotaan) per orang per tahun.
 - d. Cukup, bila mempunyai penghasilan setara dengan lebih dari 480 Kg beras (di pedesaan) dan lebih dari 720 Kg beras (di perkotaan) setiap orang per tahun.
4. Kriteria Hendra Esmara
Penentuan garis batas kemiskinan menurut Hendra Esmara, didasarkan pada jumlah pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok per kapita per tahun. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan akan beras, ketela, daging, sayur, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
5. Kebutuhan Fisik Minimum dan Kebutuhan Hidup Minimum
Penentuan batas garis kemiskinan berdasarkan indeks kebutuhan fisik minimum (KFM) dan kebutuhan hidup minimum (KHM) dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja untuk menentukan besarnya upah minimum.

Kesenjangan dan kemiskinan antar golongan pendapatan dapat diukur pula dengan indeks Gini dan dari perbandingan pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk termiskin, 40 % penduduk berpenghasilan menengah dan 20 % penduduk terkaya.

Indeks Gini adalah suatu koefisien dengan rentang 0 – 1 untuk menjelaskan kadar ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Bila indeks Gini, sama dengan dan mendekati 0,5 maka ketimpangan pendapatan dianggap berat/besar. Bila indeks Gini menunjukkan angka lebih kecil dari 0,4 dianggap kesenjangan yang terjadi relatif ringan.

Bila 40 % penduduk termiskin menerima kurang dari 12 %, maka ketimpangan pendapatan yang ada dianggap sangat mencolok. Bila 40 % penduduk termiskin menerima di atas 17 % bagian pendapatan, maka dapat dikatakan ketimpangan yang terjadi relatif ringan (Revisond Baswir, 1999).

Dari beberapa definisi yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemiskinan, di setiap daerah perlu ditetapkan kriteria tertentu untuk mengukur kesejahteraan dan kemiskinan penduduk. Data-data yang berkaitan dengan penduduk miskin dan penduduk pra sejahtera serta sebab - sebab kemiskinannya merupakan syarat mutlak yang diperlukan untuk melakukan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat di suatu wilayah secara terpadu.

POKOK BAHASAN II PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pelaksanaan otonomi daerah serta globalisasi pada millinimum ke tiga menuntut adanya efisiensi dalam kegiatan pembangunan. Pemanfaatan dan alokasi sumber daya dan dana harus seoptimal mungkin agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan harus diupayakan bersifat "bottom up planning" dengan menemu kenali potensi dan kendala pembangunan yang terdapat di setiap wilayah. Kendala-kendala dan permasalahan dalam pembangunan di segala bidang kehidupan harus dieliminir untuk menghindari ekonomi biaya tinggi. Sebaliknya peluang dan kekuatan yang ada, yang merupakan potensi wilayah perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Paradigma pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, menghasilkan krisis ekonomi yang bekepanjangan serta disparitas sosial ekonomi antar wilayah dan antara golongan penduduk makin lebar. Kondisi ini berpotensi untuk tumbuh subur disintegrasikan di wilayah bumi Indonesia. Di samping itu prioritas pembangunan pada pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan hutang Indonesia kian membengkak menjadi beban yang hampir tak tertanggungkan. Besarnya hutang pemerintah ini untuk menutup biaya pembangunan dan pencapaian program-program yang telah ditetapkan dalam upaya mempertinggi pertumbuhan ekonomi. Kesalahan manajemen dalam pembangunan yang lalu ini, diperberat pula antara lain oleh upaya yang menyederhanakan kebijakan pembangunan dengan menyusun "policy" yang bersifat "top down" tanpa memperhatikan potensi dan kendala yang ada di setiap wilayah. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang terlalu terpusat. Sebagai akibatnya, tumbuh kesenjangan ekonomi antar wilayah dan belum tercapainya keadilan dalam pembangunan yang tercermin dalam ketidakmerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan dalam pembangunan.

Menyadari akan kesalahan manajemen pembangunan pada masa lalu, dalam pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dalam paradigma pembangunan dari yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, kepada pembangunan yang berwawasan kependudukan. Paradigma pembangunan berwawasan kependudukan lebih menjamin kelangsungan pembangunan serta keberhasilan pemerataan kesempatan dan hasil-hasil pembangunan pada setiap golongan penduduk.

Manfaat yang paling mendasar dengan mengintegrasikan dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah menurut Prijono Tjiptoherianto (1999), adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di suatu daerah dapat menjadi pelaku (subyek) pembangunan dan penikmat (sasaran) hasil pembangunan. Hal ini berarti pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan serta lebih menjamin kesinambungan proses pembangunan itu sendiri. Di samping itu pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal yang bersifat "bottom up planning", disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasinya. Dengan demikian kegiatan pembangunan yang berwawasan kependudukan, sangat strategis dilaksanakan pada era otonomi daerah dan era golabilasi, yang mensyaratkan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pencapaian program-program pembangunan, termasuk pula pembangunan bidang kesra.

Sebagai pelaku dalam pembangunan perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan sumber daya manusia. Dengan demikian diperlukan suatu upaya **pembangunan kependudukan**, yang meliputi peningkatan kualitas penduduk, pengendalian jumlah penduduk dan pengarahannya mobilitas penduduk serta ketahanan keluarga. Pembangunan di bidang kependudukan ini, merupakan salah satu aspek dalam pembangunan kesejahteraan rakyat. *Bahkan pembangunan berwawasan kependudukan ini telah digariskan pula dalam dasar-dasar pemikiran GHBN tahun 1999-2004, yang menyatakan Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global.* Diharapkan pembangunan yang berwawasan kependudukan ini akan dapat meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian penduduk sebagai modal dasar pembangunan yang strategis, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas serta dapat lebih menjamin kelangsungan pembangunan.

Perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dalam pembangunan bidang Kesra, sangat membutuhkan data-data kependudukan sebagai pelaku (subyek) dan sasaran (obyek) pembangunan. Karena itu perlu ditemukannya profil kependudukan untuk merancang pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran. Data-data kependudukan yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan dan komposisi penduduk, seperti siapa, berapa banyak dan di mana sarannya serta siapa pelakunya dan apa kualifikasinya, sangat diperlukan untuk merancang, memantau dan mengevaluasi program pembangunan, khususnya di bidang Kesra yang tepat guna dan tepat sasaran.

Untuk itu penyediaan data-data kependudukan (baik makro maupun mikro) perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui penyempurnaan sistem informasi kependudukan.

Perlu diingat bahwa masalah kependudukan, tidak sekedar masalah yang berkaitan dengan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk. Namun mencakup pula permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penduduk, persebaran penduduk dan masalah peningkatan ketahanan keluarga serta penyediaan data-data /informasi kependudukan baik makro maupun mikro.

Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah, khususnya Daerah Kabupaten dan Daerah Kota untuk menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan kependudukan, yang mendasarkan pada pemanfaatan potensi dan peluang serta mengeliminir kendala dan kelemahan di setiap wilayah untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera lahir dan batin.

Pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberi kewenangan luas pada daerah untuk menyusun dan menetapkan kebijakan daerah termasuk dalam hal menyusun lembaga-lembaga yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah tidak secara eksplisit memasukkan masalah penanganan kesejahteraan penduduk, dalam tugas dan kewenangan pemerintah Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Untuk meningkatkan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan yang berwawasan kependudukan, pada pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten serta Daerah Kota, diperlukan adanya suatu institusi/lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan koordinasi dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan penduduk lintas sektoral. Lembaga/institusi tersebut diharapkan mempunyai jaringan pelayanan yang kuat dan merata yang terdapat di semua jenjang administrasi pemerintahan hingga lini lapangan.

Lembaga/institusi tersebut mempunyai kewenangan melakukan koordinasi dalam penyediaan data-data kependudukan (baik data mikro maupun data makro), data-data kemiskinan, peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya pembangunan melalui pemberdayaan penduduk dan keluarga dalam pembangunan sosial ekonomi keluarga serta pengendalian persebaran/mobilitas penduduk.

Diharapkan dengan adanya institusi/lembaga khusus yang menangani masalah kesejahteraan penduduk ini, pemerintah daerah dapat membangun penduduk maju, mandiri, sejahtera, hidup serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

POKOK BAHASAN III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

Program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat telah banyak di canangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Prioritas utama pembangunan bidang kesejahteraan rakyat di Propinsi Jawa Tengah di tekankan pada pengentasan/penanggulangan kemiskinan. Hal ini terutama berkaitan dengan prioritas program pembangunan untuk mengatasi dampak krisis moneter, melalui 4 tahapan strategis (Rescue, Recovery, Stabilization dan Development).

Program-program pengentasan kemiskinan, dilaksanakan melalui Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin), meliputi : Inpres Bangdes, Inpres Desa Tertinggal, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Program Pemberian Kerja Darurat, Program Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana, Program Peningkatan Produksi Pertanian, Program Bantuan Lumbung Desa dan Modal Kerja Koperasi, Program Takesra, Kukesra dan KPKU, Program Pemberdayaan KUBE Lemah, Program Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS) Program Pembangunan Kecamatan, Program Pengentasan Kemiskinan Daerah Kumuh Perkotaan, Program Pengentasan Kemiskinan Daerah Pantai, Program Kredit Taskin, Program Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri, Bantuan makanan tambahan "blended food" dari UNICEF, Bantuan susu formula "Snow brand" dari Jepang, Bantuan beras WFP dari Jepang, Bantuan susu untuk anak sekolah dari Amerika, Program Penyertaan Partisipasi Masyarakat (al. Bantuan dari Rotary Club untuk program kesehatan, pendidikan dan perumahan, bantuan dari masyarakat Peduli Pendidikan, Gerakan Lembaga GNOTA). Di samping itu terdapat pula program JPS yang dikoordinasikan oleh TKPP JPS (Pokjanal Gerdu Taskin Jawa Tengah, Januari 2000).

Sasaran dari Program JPS dan program Gerdu Taskin, ialah untuk mengentaskan 11.135.769 penduduk miskin (36,35 %) yang tersebar di seluruh Jawa Tengah.

Beragamnya jenis program dan banyaknya jumlah dana yang telah disalurkan, nampaknya belum memberikan hasil optimal, seperti yang diharapkan. Hal ini antara lain berkaitan dengan :

- a. Sering tumpah tindihnya sasaran/sasaran tidak tepat. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya data sasaran, baik kuantitas maupun kualitas serta lokasinya.
- b. Singkatnya waktu pelaksanaan (rentang waktu turunnya dana dan pelaporan)
- c. Orientasi keberhasilan program masih sering pada ada atau tidaknya (lengkap atau tidaknya) laporan, bukan berorientasi pada asas kemanfaatan dan kesinambungan program
- d. Bantuan yang diberikan tidak sesuai/kurang sesuai dengan kebutuhan sasaran
- e. Kualitas pengelola, sarana dan prasarana penunjang di tingkat desa/kelurahan masih terbatas.
- f. Kebijakan yang bersifat "Top down" kurang memperhatikan kebutuhan dan kualitas penduduk/sasaran.

Beberapa indikasi belum optimalnya program-program peningkatan kesejahteraan rakyat, antara lain meningkatnya jumlah penduduk miskin, pengangguran, kekerasan yang berbau sara dan kecemburuan antara golongan, meningkatnya arus balik transmigran, makin maraknya narkoba, meningkatnya angka "drop out" sekolah serta meningkatnya jumlah anak jafanan dan anak dengan gizi buruk.

Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan bidang Kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaan otonomi daerah, perlu dirancang suatu model pembangunan kesejahteraan rakyat di Propinsi Jawa Tengah, baik dalam aspek pemberdayaan ekonomi rakyat maupun aspek pemberdayaan sosial budayanya, agar tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat materiil dan spiritual dapat dicapai dengan optimal.

Beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan kesejahteraan rakyat, antara lain :

- a. Penetapan indikator kemiskinan dan kesejahteraan rakyat.
- b. Peningkatan peran serta aktif seluruh masyarakat (pembangunan yang bersifat partisipatif).
- c. Restrukturisasi perekonomian, dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan, yang menjamin tumbuh suburnya kemitraan dan kelompok usaha bersama serta koperasi.
- d. Penataan Kelembagaan, merupakan suatu upaya penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan secara terpadu oleh unsur-unsur pembangunan (baik birokrasi pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha) dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Dalam kerangka pembangunan yang partisipatif, prinsip yang harus dipegang bersama adalah : (1) Visi, Misi, strategi dan Kebijakan (aksi) pembangunan dari dan untuk rakyat. (2) Pedoman Pembangunan, yaitu dalam bentuk sasaran pembangunan lima tahunan dan tahunan (3) Mekanisme perencanaan pembangunan melalui mekanisme musyawarah

untuk mufakat yang merupakan keterpaduan perencanaan yang bersifat "bottom up" dan "top down"

- e. Kewenangan Daerah Propinsi dalam era otonomi daerah, meliputi :
1. Koordinasi : untuk kegiatan yang bersifat lintas wilayah
 2. Konsultasi : memberikan konsultasi atas perencanaan dan pelaksanaan serta penetapan kebijakan pada Daerah Kabupaten dan Kota
 3. Pengawasan : misalnya dalam hal melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan peraturan Daerah Kabupaten dan Kota yang bertentangan dengan peraturan daerah di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ananta, Aris. 1991. "Variabel Demografi Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi". Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
2. Baswir, Revison dkk, 1999. *Pembangunan Tanpa Perasaan*. Jakarta : Elsam
3. Biro Pusat Statistik, 1992. *Perhitungan Jumlah Penduduk Miskin Dan Distribusi Pendapatan*. Jakarta : BPS
4. BKKBN – Kanwil Prop. Jateng.1999. *Informasi Eksekutif Penduduk Dunia Sedang Meluncur Menuju 6 Milyard*, Semarang
5. _____. *Informasi Eksekutif Pola TFR Propinsi Jawa Tengah Berdasarkan Hasil Susenas 1998*. Semarang : Agustus.
6. Coale, Ansley J. dan Hoover, Edgar M.1958. *Population and Economic Development in Low-Income Countries*. Princeton : Princeton University Press.
7. Esmara, Hendra, 1986. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia
8. Herniwati RH, 1997. "Indikator Dinamis Keseimbangan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan". Makalah disampaikan dalam Temu Konsultasi "Meningkatkan Peranan PSK Dalam Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga" Jakarta : Kantor Mengduk/BKKBN, 20 November.
9. Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, 2000. Pokjanal Gerdu Taskin Propinsi Jawa Tengah
10. Ketetapan – Ketetapan MPR Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999. Surabaya : Bina Pustaka Tama.
11. Pradekso, Tandyo dan Triyono Lukmantoro. 1999. *Profil Kependudukan Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998*, Semarang : Pusat Penelitian Kependudukan – Undip dan BKKBN Kanwil Propinsi Jawa Tengah.
12. Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Tengah, 1999.
13. Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*. Jakarta : Percetakan PT SUN.
14. Sumodiningrat, Gunawan, dkk. 1999. *Kemiskinan : Teori, Fakta Dan Kebijakan*. Jakarta : Penerbit IMPAC
15. Tjiptoherianto, Priyono.1999. "Biaya Dan Manfaat Pembangunan Berwawasan Kependudukan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Millinium III", Makalah disampaikan dalam "Seminar Sehari Urgensi Program-Program Kependudukan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Millinium III" Semarang : PPK – Lemlit - Universitas Diponegoro, 18 September.
16. Undang- Undang Otonomi Daerah 1999. Jakarta : Penerbit Restu Agung.
17. World Development Report, 1990. Washington DC : Oxford University Press.